



Konsep Kekuasaan Dan Legitimasi Dalam Perspektif Antropologi

Marzuki Manurung¹, Thorino Ivan Doloksaribu², Ayu Purnama Sari³, Abib Alwi Alamsyah⁴, Mahdy Husnul Widad⁵, Bagus Prasetyo⁶, Ahmad Afriza Nasuition⁷, Aldino Ilham⁸, Muhammad Muzamil⁹, Muhammad Irham Fahmi¹⁰

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻¹⁰

Email Korespondensi: marzuki1100000173@uinsu.ac.id¹, thorinodoloksaribu@gmail.com², yoesary1308@gmail.com³, abibalwia38@gmail.com⁴, mahdyhusnulwidad@gmail.com⁵, bagusprasetyo1003@gmail.com⁶, ahmadafriza982@gmail.com⁷, aldinoilham0@gmail.com⁸, ifcrusna@gmail.com⁹, mhdirhamfahmi@gmail.com¹⁰

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Power and legitimacy are two fundamental concepts in the study of political anthropology that determine how social structures, authority, and governance practices are formed and maintained. This topic is important to discuss because contemporary political dynamics, both at the state and local community levels, demonstrate that power is not only derived from formal institutions but is also constructed through symbols, traditions, and cultural norms that influence legitimacy. The urgency of this research lies in the need to understand the relationship between power and legitimacy in the context of a pluralistic society, where intercultural interactions often create hybrid forms of authority. The main issue raised is how the legitimacy of power is formed, maintained, and negotiated in a social space saturated with cultural values. This research uses a qualitative approach with literature review and discourse analysis methods on works of political anthropology, as well as limited observations of symbolic practices in local communities. Preliminary results indicate that legitimacy does not only derive from formal legality but also from social recognition constructed through rituals, symbols, and cultural practices. Thus, political anthropology makes an important contribution to understanding that power is relational and that legitimacy always depends on the surrounding socio-cultural context.

Keywords: Anthropology, Legitimacy, Power

ABSTRAK

Kekuasaan dan legitimasi merupakan dua konsep fundamental dalam kajian antropologi politik yang menentukan bagaimana struktur sosial, otoritas, dan praktik pemerintahan terbentuk serta dipertahankan. Topik ini penting untuk dibahas karena dinamika politik kontemporer, baik di level negara maupun komunitas lokal, memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari institusi formal, tetapi juga dibangun melalui simbol, tradisi, dan norma budaya yang memengaruhi legitimasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami relasi antara kekuasaan dan legitimasi dalam konteks masyarakat majemuk, di mana interaksi antarbudaya sering kali menciptakan bentuk otoritas yang hibrid. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam ruang sosial yang sarat dengan nilai budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana terhadap karya-karya antropologi politik, serta observasi

terbatas pada praktik simbolik di komunitas lokal. Hasil sementara menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari pengakuan sosial yang dibangun melalui ritual, simbol, dan praktik budaya. Dengan demikian, antropologi politik memberikan kontribusi penting untuk memahami bahwa kekuasaan bersifat relasional dan legitimasi selalu bergantung pada konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

Kata Kunci: Antropologi, Legitimasi, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Kekuasaan dan legitimasi selalu menjadi tema yang tak lekang dalam antropologi politik (Siswandani & Prasetyo, 2022). Keduanya tidak hanya mengatur bagaimana negara bekerja, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam kenyataannya, kekuasaan bukan sekadar perintah dari penguasa kepada rakyat, melainkan terjalin dalam bahasa (Arsantika Febrianti.N & Gigit Mujiyanto, 2023), simbol, serta praktik budaya yang berlangsung terus menerus (Dasih, 2021). Legitimasi hadir di titik di mana masyarakat menerima atau menolak bentuk kekuasaan tertentu, sehingga tanpa legitimasi, kekuasaan kehilangan pijakannya (Sumitro & Yorman, 2024).

Konteks saat ini memperlihatkan gejala yang mengkhawatirkan. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga politik, meningkatnya retorika populisme, hingga perebutan legitimasi antara hukum negara dan tradisi lokal menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan tidak pernah sederhana. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yang hanya bertumpu pada aturan formal sering kali goyah, karena masyarakat memiliki cara sendiri untuk menilai apakah suatu otoritas pantas diikuti atau tidak. Dari sinilah urgensi penelitian muncul: perlu memahami kembali konsep kekuasaan dan legitimasi, bukan hanya dari sudut pandang hukum dan politik formal, tetapi juga dari antropologi yang menyoroti simbol, budaya, dan praktik sosial.

Masyarakat menerima dan memberikan legitimasi kekuasaan melalui warisan nenek moyang yang disebut dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prioharyono, 2012). *Mosalaki Lio* namanya yang disebut sebagai ketua adat tradisi suku Lio adalah sebutan untuk pemangku adat atau pemimpin suku dalam masyarakat Suku Lio di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memegang kekuasaan adat, bertanggung jawab atas ritual, dan menguasai hak ulayat, dengan makna harfiah "laki-laki tuan/pemilik kekuasaan" dari kata "Mosa" (laki-laki) dan "Laki" (tuan). *Mosalaki Lio* merupakan gambaran legitimasi kekuasaan yang didapat melalui warisan budaya dalam menentukan kekuasaan dan memberikan kekuasaan kepada mereka yang diterima masyarakat secara adat yang dipercaya.

Pemberian legitimasi melalui budaya memang sering terjadi (Debbaut & De Kimpe, 2023) jika dilihat melalui Antropologi Politiknya di Indonesia (Zahra et al., 2024). Selain *Mosalaki Lio* pemberian legitimasi kekuasaan melalui budaya dan diterima oleh masyarakat adalah pemberian kekuasaan di Provinsi DI Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat Robuwan, 2023) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di pilih dan ditetapkan melalui simbolik budaya.

Gubernur DI Yogyakarta dipilih berdasarkan keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IV sedangkan wakil gubernur berdasarkan keturunan Paku Alam VIII. Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta di tetapkan berdasarkan silsilah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dalam hal ini ialah Sultan Keraton Yogyakarta yang sekaligus menjadi seorang Gubernur dalam pemerintahan daerah Yogyakarta dan Pangeran Adipati Pakualam menjadi Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan silsilah kerajaan pula.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eka Pratiwi et al., 2024) juga menunjukkan terdapat pemberian legitimasi kekuasaan melalui simbol budaya, yaitu kekuasaan Adityawarman di Kerajaan Melayu. Pemberian legitimasi yang didapat oleh Adityawarman bersumber dari nilai-nilai budaya seperti prasasti. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan terdapat 6 prasasti yang mempengaruhi kekuasaan legitimasinya yaitu; Prasasti Pagaruyung I, Prasasti Pagaruyung II, Prasasti Saruaso I, Prasasti Kuburajo I, Prasasti Amoghapāśa, dan Prasasti Ombilin.

Berdasarkan hasil ringkasan penelitian sebelumnya penulis melihat kesenjangan yaitu penelitian sebelumnya belum menunjukkan bagaimana kerangka kerja simbolik seperti pengaruh budaya, dominasi, dan konsensus sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Bagaimana legitimasi seperti simbolik, dominasi, dan konsensus menjadi pijakan dasar dalam menjaga agar kekuasaan tidak runtuh. Penelitian ini menunjukkan pentingnya Antropologi politik sebagai pendekatan sudut pandang yang berfungsi untuk melihat praktik-praktik politik terdahulu dalam memperkuat dan memperluas kekuasaan.

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada tiga aspek penting terkait judul. Pertama, kekuasaan simbolik, yakni bagaimana tanda, ritual, atau bahasa dapat memperkuat legitimasi. Kedua, dominasi, yaitu wujud penguasaan yang dijalankan oleh elite maupun negara untuk mempertahankan otoritasnya. Ketiga, konsensus, yaitu ruang kesepahaman sosial yang membuat kekuasaan dapat diterima tanpa paksaan. Ketiga aspek ini dipilih karena saling berkait antara simbol memberi makna pada kekuasaan, dominasi memberi struktur, sedangkan konsensus menjaga keberlanjutannya.

Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian dapat dirangkum dalam pembahasan bagaimana simbol memperkuat legitimasi kekuasaan, bagaimana dominasi bekerja dalam relasi sosial-politik, dan bagaimana konsensus tercipta di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus menunjukkan arah penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga pembahasan mampu menyingkap lebih dalam hubungan antara kekuasaan dan legitimasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan cara simbol bekerja dalam legitimasi politik, menganalisis bentuk dominasi yang dijalankan dalam struktur sosial, serta menjelaskan bagaimana konsensus muncul sebagai dasar penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan. Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada gagasan Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik (Fatmawati, 2020), Antonio Gramsci tentang hegemoni yang memadukan dominasi dengan konsensus (Fansuri, 2017), serta Max Weber yang memperkenalkan tiga bentuk legitimasi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Szelenyi, 2016). Literatur ini

memberikan landasan untuk memahami bahwa legitimasi tidak hanya legal, tetapi juga kultural.

Berdasarkan kerangka ini, arah kesimpulan penelitian dapat diperkirakan. Kekuasaan selalu bersifat relasional, ia tidak dapat bertahan hanya melalui paksaan, melainkan membutuhkan pengakuan sosial. Legitimasi lahir dari simbol yang diinternalisasi masyarakat, dominasi yang dilembagakan, dan konsensus yang mengikat secara kultural. Dengan pendekatan antropologi politik, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan wajah kekuasaan yang lebih kompleks dan kontekstual, sehingga membuka ruang analisis baru terhadap dinamika politik di masyarakat majemuk.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sakir, 2024) dengan perspektif antropologi politik sebagai kerangka analisis utama (Ardhianto, 2020). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna kekuasaan dan legitimasi sebagaimana dipraktikkan, ditafsirkan, serta dinegosiasikan dalam kehidupan sosial, bukan sekadar mengukur gejala secara kuantitatif (Mastiyah, 2024). Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur klasik maupun kontemporer mengenai kekuasaan, legitimasi, dan antropologi politik, serta diperkaya dengan analisis wacana terhadap teks, simbol, dan praktik budaya yang relevan dengan konteks politik Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan pengamatan terbatas terhadap fenomena sosial-politik yang memperlihatkan bagaimana simbol digunakan dalam memperkuat legitimasi, bagaimana dominasi dimanifestasikan dalam struktur kekuasaan, serta bagaimana konsensus sosial dibangun di antara masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interpretatif dengan merujuk pada teori-teori Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik, Max Weber mengenai tipologi legitimasi (Dwizatmoko, 2010), dan Antonio Gramsci mengenai hegemoni (Ali, 2017). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyingkap lapisan-lapisan makna yang tidak tampak di permukaan, sehingga dapat menjelaskan bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk melalui perpaduan antara simbol, dominasi, dan konsensus dalam konteks sosial budaya yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Simbolik

Kekuasaan simbolik dalam kerangka Bourdieu merupakan jenis kekuasaan yang bekerja dengan cara paling halus, namun justru paling efektif dalam jangka panjang. Ia tidak hadir dalam bentuk paksaan fisik atau regulasi formal yang memaksa, melainkan lewat mekanisme pengakuan sosial yang sering kali tidak disadari (Mega Mustikasari et al., 2023). Bourdieu menyebutnya sebagai *misrecognition*, yaitu ketika masyarakat menerima simbol sebagai sesuatu yang sah tanpa mempertanyakan asal-usul maupun tujuan di baliknya (Wiranta, 2020). Misalnya, sebuah tanda tangan presiden dalam sebuah keputusan dianggap sebagai

puncak legalitas, padahal pada hakikatnya hanya berupa coretan tinta. Namun karena masyarakat sudah menginternalisasi makna bahwa tanda tangan tersebut mewakili kekuasaan tertinggi negara, maka ia dipandang penuh wibawa. Dari titik ini terlihat jelas bahwa simbol tidak netral, melainkan instrumen dominasi yang bisa membuat orang tunduk tanpa merasa ditundukkan (Ningtyas, 2015). Hal serupa tampak pada Aksi 212, di mana narasi “membela agama” dan simbol pakaian serba putih menjadi instrumen legitimasi. Atribut sederhana tersebut diinternalisasi sebagai tanda kesalehan dan keberpihakan pada identitas religius, sehingga mampu mengikat massa dalam solidaritas yang kokoh (Fakhrani, 2024).

Lebih jauh, simbol bukan hanya benda atau tanda, melainkan praktik sosial yang terus-menerus dipelihara. Upacara kenegaraan, ritual politik, hingga pemakaian bahasa resmi adalah cara penguasa menanamkan legitimasi lewat representasi simbolik (Muhammad Fiqri Fadilah & Saiman, 2007). Sebagai contoh, prosesi pelantikan pejabat negara selalu disertai sumpah di hadapan kitab suci, lambang negara, dan saksi publik. Semua itu menciptakan aura kesakralan yang membuat pejabat yang baru dilantik tampak sah dan pantas memegang otoritas. Padahal, tanpa simbol-simbol itu, pelantikan bisa saja berlangsung sederhana, tetapi justru kehilangan daya ikat pada masyarakat. Dengan demikian, legitimasi tidak lahir semata-mata dari hukum, melainkan dari bagaimana hukum dipentaskan dalam bentuk simbol yang menanamkan makna pada kesadaran kolektif (Syahwal, 2024). Dalam konteks Aksi 212, fatwa MUI yang beredar melalui media sosial berfungsi seperti “ritual simbolik” modern, karena memberi aura kesakralan pada tuntutan politik, menjadikannya lebih sukar dibantah dan lebih mudah diterima oleh publik (Bagus Riadi & Diki Drajat, 2019).

Simbol juga menjadi sarana pembentukan jarak sosial yang mempertegas hierarki kekuasaan (Dirhman, 2025). Penggunaan pakaian adat oleh pemimpin daerah dalam sebuah acara resmi, misalnya, bukan sekadar penghormatan pada tradisi, melainkan pernyataan simbolik bahwa ia adalah representasi otoritas kultural dan politik sekaligus (Siti Asma Slamet & Afdhal, 2024). Demikian pula tata bahasa formal yang digunakan pejabat dalam pidato berbeda jauh dari bahasa sehari-hari masyarakat (Hadi, 2018). Bahasa yang berjarak itu menegaskan perbedaan posisi, membuat pejabat tampak lebih berwibawa, dan masyarakat merasa pantas untuk menghormatinya (Irfan Sobari & Meli Fauziah, 2025). Bourdieu menyebut praktik ini sebagai *linguistic capital*, di mana penguasaan bahasa tertentu menjadi simbol kekuasaan yang memberi legitimasi lebih besar kepada pemiliknya (Karman, 2017).

Namun, kekuasaan simbolik tidak hanya diproduksi di ruang formal negara. Ia juga bekerja dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik budaya dan tradisi. Ambil contoh upacara adat yang mempertemukan pejabat pemerintah dengan tokoh masyarakat. Dalam peristiwa itu, simbol seperti persembahan, ritual doa, dan gelar kehormatan menjadi media penghubung antara otoritas politik dan otoritas budaya. Kehadiran simbol tersebut membuat penguasa diterima tidak hanya secara politik, tetapi juga secara kultural. Dari sini kita bisa melihat bahwa legitimasi

simbolik sering kali lebih dalam dibandingkan legitimasi hukum, karena ia bersandar pada nilai yang sudah hidup di tengah masyarakat.

Kekuasaan simbolik juga bersifat performatif, artinya ia hanya berfungsi ketika ditampilkan dan diakui (Jayadi et al., 2025). Sebuah bendera hanyalah kain berwarna sebelum ia dikibarkan dalam sebuah upacara militer. Tetapi ketika bendera itu berdiri tegak diiringi lagu kebangsaan, ia menjadi representasi nasionalisme, kesetiaan, dan bahkan pengorbanan. Performa simbol ini meneguhkan makna yang diterima masyarakat, sekaligus memperkuat ikatan emosional dengan negara (Gusti Riyanto et al., 2024). Namun performa juga membuka kemungkinan terjadinya krisis. Jika simbol ditampilkan secara tidak tepat misalnya seorang pejabat yang mengenakan atribut kebangsaan tetapi terjerat kasus korupsi maka simbol yang tadinya memperkuat legitimasi justru bisa melemahkannya (Yao et al., 2025).

Tidak kalah penting, kekuasaan simbolik selalu bersifat dinamis. Ia bisa melemah ketika masyarakat mulai mempertanyakan makna simbol atau ketika simbol kehilangan relevansinya (Andi Nursida et al., 2025). Seperti contoh Gelar atau nasab di Indonesia bukan hanya dilihat sebagai keturunan biologis, tetapi sebagai simbol yang memiliki nilai kapital sosial dan keagamaan. Gelar-gelar seperti sayyid atau habib dalam komunitas Ba'alwi menjadi simbol otoritas spiritual dan moral, yang memberikan legitimasi dalam struktur sosial, dalam masyarakat modern bisa menjadi sekadar formalitas tanpa daya ikat sosial yang signifikan (Nasyirudin, 2025). Di era digital, simbol bahkan lebih rentan, sebab ia dapat diparodikan atau digugat melalui media sosial. Karikatur politik, meme, hingga aksi satir adalah bentuk resistensi terhadap simbol-simbol yang hendak dipertahankan oleh penguasa (Kumaat, 2024). Hal ini membuktikan bahwa legitimasi simbolik tidak pernah final, melainkan selalu berada dalam arena kontestasi antara dominasi dan resistensi.

Dengan demikian, pembacaan Bourdieu memberi kita pemahaman bahwa kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang tertanam dalam struktur sosial sekaligus kesadaran kolektif. Ia membentuk kebiasaan, cara pandang, dan persepsi masyarakat sehingga otoritas tampak wajar dan pantas ditaati. Namun pada saat yang sama, simbol juga dapat menjadi titik rawan bagi kekuasaan ketika masyarakat menemukan celah untuk mendekonstruksi makna yang melekat padanya. Maka, dalam antropologi politik, analisis simbol tidak bisa dilepaskan dari pertarungan makna yang berlangsung terus-menerus di antara aktor-aktor sosial. Kekuasaan simbolik tidak hanya membuat legitimasi bertahan, tetapi juga menjadi medan di mana legitimasi diuji, ditantang, bahkan ditumbangkan.

Dominasi

Dominasi dalam kerangka antropologi politik tidak sekadar dimaknai sebagai kontrol langsung dari satu pihak terhadap pihak lain, tetapi juga sebagai mekanisme yang lebih kompleks, di mana kekuasaan hadir melalui aturan, wacana, dan kebiasaan sosial yang membentuk kesadaran kolektif (Najwah Addina & Muh. Hanif, 2025). Gramsci memberi pemahaman mendalam tentang hal ini melalui

konsep hegemoni, yakni ketika kelas dominan tidak hanya menguasai alat-alat produksi atau aparatus negara, tetapi juga berhasil menanamkan cara pandang yang diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh kelompok subordinat (Sasanti Silvy Putri et al., 2025). Dalam kondisi ini, masyarakat sering kali tidak merasa ditindas, karena dominasi dibungkus dalam narasi kepentingan bersama (Riedho & Angga, 2024). Inilah mengapa dominasi sulit dibaca secara kasat mata, sebab ia merasuk ke dalam cara orang berpikir dan bertindak sehari-hari. Salah satu arena dominasi yang paling signifikan adalah negara, yang oleh banyak teoritis dianggap sebagai instrumen kelas dominan untuk mempertahankan posisinya (Choudhary, 2024). Namun Gramsci menolak pandangan reduksionis yang hanya melihat negara sebagai alat represi. Ia menekankan bahwa dominasi berlangsung melalui kombinasi paksaan (*coercion*) dan persetujuan (*consent*) (Syahdidatul Faizah Maulidiastuti & Anas Ahmadi, 2025). Aparatur negara seperti hukum, polisi, dan militer memang menciptakan ketakutan yang menjaga keteraturan, tetapi legitimasi negara tidak akan bertahan lama jika hanya bertumpu pada kekuatan koersif (Naguib, 2020). Maka, nilai-nilai nasionalisme, moralitas, dan ideologi pembangunan diperkenalkan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat. Proses inilah yang menjadikan dominasi tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga secara kultural.

Dominasi dalam relasi sosial-politik juga dapat kita temukan dalam distribusi pengetahuan. Pendidikan, misalnya, sering kali dijadikan medium untuk membentuk generasi yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan (Baharudin & H. Ibnu Hizam, 2022). Kurikulum sekolah tidak jarang dirancang untuk menekankan narasi tertentu tentang sejarah bangsa, tokoh politik, atau bahkan orientasi ekonomi (Robin et al., 2024). Dari sudut pandang antropologi politik, pendidikan berperan ganda, ia dapat menjadi ruang pembebasan, tetapi juga sarana dominasi ketika digunakan untuk melanggengkan ideologi kelas dominan (Nasiwan & Yuyun Sri Wahyuni, 2016). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dominasi tidak hanya terkait struktur politik, melainkan juga mencakup produksi makna dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, praktik dominasi tampak jelas dalam penguasaan media oleh kelompok politik dan bisnis besar (Muttaqin et al., 2025). Media yang seharusnya menjadi ruang publik untuk menyuarakan beragam perspektif sering kali dikooptasi untuk menguatkan citra pihak tertentu. Penyajian berita, pilihan narasi, hingga penekanan isu tertentu menjadi instrumen hegemoni yang efektif (Erman Anom, Hamdani M. Syam, Nur Anisah, 2023). Masyarakat mengonsumsi informasi tersebut tanpa selalu sadar bahwa ia diarahkan untuk membenarkan posisi elite. Dominasi ini berjalan halus, tidak melalui larangan eksplisit, tetapi melalui pengaturan agenda publik sehingga pandangan yang berlawanan tampak kurang relevan atau dianggap ekstrem (Arasta & Sigit, 2022). Dominasi juga bekerja di tingkat lokal, terutama ketika negara bertemu dengan komunitas adat atau kelompok masyarakat kecil. Pembangunan infrastruktur, misalnya, sering dipresentasikan sebagai proyek kesejahteraan, tetapi di baliknya terdapat praktik perampasan tanah yang merugikan masyarakat adat (Krisna Angela & Anik

Setyawati, 2022). Narasi pembangunan menjadi tameng yang membuat dominasi terlihat rasional. Antropologi politik menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar tunduk begitu saja, melainkan melakukan negosiasi dengan simbol dan tradisi mereka. Namun, karena relasi kekuatan tidak seimbang, hasil dari negosiasi itu sering kali tetap menguntungkan pihak dominan.

Hal lain yang penting diperhatikan adalah bagaimana dominasi berlapis dengan identitas sosial. Gender, kelas, dan etnis kerap menjadi dasar pembentukan relasi kekuasaan yang timpang. Dalam banyak kasus, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dengan alasan budaya atau agama, padahal sebenarnya itu adalah bentuk dominasi yang dilegitimasi oleh sistem nilai (Novarisa, 2019). Demikian juga dalam politik elektoral, kelompok minoritas etnis sering dipinggirkan dari akses representasi karena dianggap tidak memiliki basis suara mayoritas (Judit Kende, Julia Reiter, 2022). Dengan demikian, dominasi bukan hanya soal relasi negara dan rakyat, tetapi juga bagaimana struktur sosial internal suatu masyarakat mempertahankan ketidaksetaraan.

Meski demikian, dominasi tidak pernah mutlak. Gramsci menekankan bahwa hegemoni selalu dalam kondisi rapuh karena membutuhkan pembaruan terus-menerus (Ali, 2017). Begitu masyarakat mulai menyadari ketimpangan atau menemukan narasi tandingan, dominasi bisa runtuh. Sejarah dunia mencatat runtuhnya rezim otoriter bukan hanya karena krisis ekonomi atau lemahnya kekuatan militer, tetapi karena masyarakat berhasil membongkar legitimasi ideologis yang menopang kekuasaan (Putra, 2023). Gerakan mahasiswa, organisasi sipil, dan media alternatif sering menjadi kanal resistensi yang menantang narasi dominan. Proses ini memperlihatkan bahwa dominasi selalu menghadapi oposisi, meskipun dalam bentuk kecil yang pada awalnya mungkin tidak terlihat.

Dalam praktik kontemporer, dominasi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi digital. Media sosial membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menantang wacana dominan, tetapi pada saat yang sama ia juga menjadi arena dominasi baru (Yudha Catur Pamungkas et al., 2024). Algoritma yang dikendalikan oleh perusahaan besar menentukan informasi apa yang muncul di lini masa, sehingga persepsi publik tetap dapat diarahkan (Kellogg et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa dominasi tidak pernah hilang, hanya bergeser bentuknya. Dari perspektif antropologi politik, hal ini penting karena memperlihatkan bagaimana kekuasaan terus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi (Karisna, 2020).

Akhirnya, dominasi dalam relasi sosial-politik dapat disimpulkan sebagai fenomena yang berlapis, ada dimensi koersif yang kasat mata, ada dimensi hegemonik yang bekerja di tingkat ide dan simbol, serta ada dinamika resistensi yang membuat dominasi tidak pernah permanen. Antropologi politik memberi kita alat untuk membaca lapisan-lapisan ini, sehingga kita dapat memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memerintah, tetapi juga bagaimana otoritas itu diterima, dinegosiasikan, dan kadang ditolak. Dengan demikian, studi dominasi bukan hanya membuka tabir relasi politik, tetapi juga mengungkap jalinan sosial yang membuat kekuasaan tetap bertahan atau justru runtuh.

Konsensus

Konsensus pada dasarnya adalah bentuk kesepakatan kolektif yang dicapai oleh sekelompok orang untuk menjaga keteraturan dan mengurangi konflik. Ia berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat hidup bersama dalam perbedaan, tanpa terus-menerus terjerumus ke dalam pertikaian (Leksono et al., 2019). Dalam antropologi politik, konsensus tidak semata dipahami sebagai hasil akhir sebuah perundingan formal, tetapi sebagai proses yang berlangsung di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Artinya, konsensus adalah bagian dari “lem perekat” yang menjaga masyarakat tetap utuh, meskipun anggotanya memiliki kepentingan, identitas, dan pandangan yang berbeda (Syarwi, 2022).

Max Weber membantu kita memahami konsensus melalui kerangka legitimasi. Bagi Weber, otoritas politik hanya dapat bertahan jika masyarakat memberikan pengakuan, dan pengakuan itu terwujud dalam konsensus (Netelenbos, 2020). Legitimasi tradisional, misalnya, melahirkan konsensus karena masyarakat memandang tradisi sebagai sesuatu yang sakral dan tidak perlu dipertanyakan (Budi Mulianto & Rijalul Fikri, 2018). Konsensus jenis ini sering kita jumpai dalam masyarakat adat yang mematuhi keputusan pemimpin karena dianggap warisan leluhur (M. Yusuf & Gina Nabilah Effendi, 2021). Sementara legitimasi karismatik menghasilkan konsensus yang lebih cair, di mana masyarakat sepakat mengikuti seorang tokoh karena daya tarik dan kharisma pribadinya (Zhang et al., 2024). Sedangkan dalam legitimasi rasional-legal, konsensus dibangun atas dasar kepercayaan terhadap aturan, hukum, dan prosedur yang dianggap sah oleh semua pihak (Akbar & Heradika, 2025).

Dalam praktik sosial, konsensus tidak pernah murni lahir dari satu bentuk legitimasi saja. Di banyak masyarakat, kita dapat menemukan campuran dari ketiganya. Misalnya dalam konteks negara modern, konsensus politik saat pemilu dapat dilihat sebagai bentuk legitimasi rasional-legal. Namun, kandidat tertentu bisa juga mendapatkan dukungan luas karena kharisma pribadinya atau karena dianggap melanjutkan tradisi politik tertentu. Dengan demikian, konsensus tidak statis, melainkan selalu berada di antara berbagai sumber legitimasi yang saling mempengaruhi.

Konsensus juga terbangun melalui praktik sehari-hari. Dalam musyawarah desa, misalnya, masyarakat duduk bersama untuk memutuskan penggunaan dana pembangunan. Proses ini sering kali diwarnai perdebatan, tetapi akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dianggap sah oleh semua pihak. Menariknya, dalam proses ini konsensus tidak hanya lahir dari argumentasi rasional, tetapi juga dari pertimbangan simbolik seperti siapa yang lebih dihormati, bagaimana bahasa disampaikan, dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi. Inilah yang membuat konsensus menjadi bagian dari kebudayaan, bukan hanya sekadar produk politik formal. Dalam konteks yang lebih luas, media juga memainkan peran penting dalam membentuk konsensus. Di era digital, konsensus bisa muncul dari viralitas sebuah isu yang memaksa negara atau elit politik mengambil sikap.

Gerakan #ReformasiDikorupsi pada tahun 2019(Adhipermana & Subono, 2022), misalnya, menunjukkan bagaimana konsensus publik terbentuk melalui media sosial di luar saluran politik formal. Antropologi politik membaca fenomena ini sebagai ekspresi bagaimana masyarakat membangun kesepahaman baru dengan caranya sendiri, tanpa harus melalui institusi negara.

Contoh antropologis juga dapat dilihat dalam praktik masyarakat adat. Misalnya, dalam sistem kekerabatan di beberapa komunitas Indonesia timur, keputusan penting mengenai tanah ulayat diambil melalui ritual dan musyawarah adat. Di sini, konsensus tidak hanya tentang kesepakatan rasional, tetapi juga legitimasi simbolik melalui kehadiran tokoh adat, penggunaan bahasa ritual, serta penghormatan terhadap leluhur. Proses ini menunjukkan bahwa konsensus selalu berlapis: ia mengandung dimensi sosial, politik, simbolik, dan spiritual sekaligus(Fadrullah & Syam, 2024).

Konsensus memiliki hubungan erat dengan legitimasi politik. Selama masyarakat masih percaya bahwa sebuah sistem politik sah, maka konsensus bisa dipelihara. Tetapi ketika legitimasi runtuh misalnya karena korupsi, manipulasi, atau pengkhianatan terhadap janji politik maka konsensus pun pecah. Inilah mengapa konsensus sering kali rapuh: ia bisa tampak kokoh di permukaan, tetapi mudah goyah ketika fondasi legitimasi terguncang. Weber sendiri menekankan bahwa otoritas yang gagal mempertahankan legitimasi akan kehilangan pengakuan masyarakat, dan itu berarti konsensus yang menopangnya ikut hilang. Dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat bagaimana konsensus nasional pernah dipaksakan oleh rezim Orde Baru dengan jargon stabilitas. Masyarakat tampak setuju, tetapi sesungguhnya konsensus itu lebih banyak dibangun melalui dominasi simbolik dan represi politik. Begitu legitimasi rezim melemah akibat krisis ekonomi dan korupsi yang merajalela, konsensus runtuh seketika dan menghasilkan perubahan besar di tahun 1998. Contoh ini memperlihatkan bahwa konsensus yang tampak stabil belum tentu kokoh jika tidak ditopang oleh legitimasi yang benar-benar diakui masyarakat.

Dari perspektif antropologi politik, konsensus dapat dipahami sebagai ruang negosiasi yang tidak pernah selesai. Ia bukan hanya soal kesepakatan, tetapi juga tentang bagaimana makna kekuasaan diproduksi dan diperdebatkan. Konsensus adalah tanda bahwa masyarakat rela menerima aturan main tertentu, tetapi pada saat yang sama juga selalu siap menegosiasikannya kembali ketika merasa tidak diuntungkan. Di sinilah letak pentingnya penelitian tentang konsensus: ia membuka mata kita bahwa stabilitas politik dan sosial tidak pernah benar-benar final, melainkan harus terus dirawat. Maka, konsensus dalam masyarakat bukanlah hasil tunggal dari rasionalitas politik, melainkan konstruksi sosial yang lahir dari interaksi antara tradisi, kharisma, hukum, simbol, dan praktik sehari-hari. Dengan memahami konsensus dari kacamata Weber dan antropologi politik, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan memperoleh pengakuan, bagaimana legitimasi dipertahankan, dan bagaimana masyarakat menemukan cara untuk tetap bersama di tengah keragaman dan potensi konflik.

SIMPULAN

Dari keseluruhan uraian, jelas terlihat bahwa kekuasaan dan legitimasi bukanlah sesuatu yang hadir secara tunggal ataupun sederhana. Ia merupakan konstruksi sosial yang terus diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui beragam mekanisme. Kekuasaan simbolik, seperti yang dijelaskan Pierre Bourdieu, menunjukkan bagaimana simbol, bahasa, dan praktik budaya dapat menormalisasi relasi kuasa hingga ia diterima sebagai sesuatu yang wajar. Simbol-simbol ini bekerja halus, bahkan tak kasat mata, sehingga masyarakat sering kali tidak sadar sedang tunduk pada struktur kekuasaan tertentu. Dominasi, sebagaimana diuraikan Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni, memperlihatkan bahwa relasi kuasa tidak hanya dipertahankan lewat paksaan, tetapi juga lewat penerimaan. Paduan antara *force* dan *consent* membentuk suatu tatanan yang membuat masyarakat setuju pada aturan main meskipun kadang merugikan mereka. Dalam konteks ini, dominasi bukan semata tindakan represif, melainkan juga pengelolaan ide, nilai, dan wacana yang diterima luas. Hal ini menjelaskan mengapa rezim atau elit dapat bertahan lama, sejauh mereka mampu menanamkan pandangan dunia tertentu ke dalam kesadaran masyarakat.

Sementara itu, konsensus, sebagaimana dipahami dalam kerangka Max Weber, merupakan titik temu yang memberi legitimasi pada otoritas. Weber menunjukkan bahwa legitimasi dapat lahir dari tradisi, kharisma, atau hukum rasional-legal, dan dari situ konsensus terbentuk. Namun, antropologi politik menambahkan bahwa konsensus sejatinya adalah arena yang cair, penuh dengan simbol, negosiasi, dan praktik sosial sehari-hari. Konsensus bisa tampak kokoh, tetapi sewaktu-waktu rapuh ketika legitimasi yang mendasarinya terguncang. Dengan kata lain, konsensus tidak pernah selesai; ia selalu dalam proses pembaruan. Dari ketiga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan legitimasi dalam perspektif antropologi politik bersifat multidimensional. Ia bekerja melalui simbol yang mengikat kesadaran, dominasi yang mengatur arah ideologi, dan konsensus yang menjaga kohesi sosial. Ketiganya saling terkait dan membentuk jaringan kompleks yang menjelaskan mengapa kekuasaan bisa bertahan, kapan ia goyah, dan bagaimana ia digugat. Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa memahami kekuasaan tidak cukup hanya melihat struktur politik formal atau perangkat negara. Kita perlu membaca tanda, simbol, praktik sosial, hingga narasi yang beredar di masyarakat. Kekuasaan hadir di ruang rapat parlemen, tetapi juga di ruang tamu desa, di media massa, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Hanya dengan membaca kekuasaan dari lapisan yang luas inilah kita bisa memahami bagaimana legitimasi dibangun dan dipertahankan. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam memperkaya kajian antropologi politik di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan yang diperebutkan, melainkan juga soal bagaimana masyarakat menyepakatinya. Melalui simbol, dominasi, dan konsensus, kita melihat bahwa politik adalah medan budaya sekaligus arena pertarungan makna. Kesadaran akan hal ini membantu kita untuk lebih kritis menilai kekuasaan, sekaligus memahami dinamika sosial yang menopangnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhipermana, L. D., & Subono, N. I. (2022). #ReformasiDikorupsi: Emergence and Failure. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v6i1.10527>
- Akbar, F. R., & Heradika, D. (2025). Fenomena " No Viral No Justice " di Indonesia : Disrupsi Legitimasi Institusional dan Dilema Keadilan Selektif di Era Jaringan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34599–34607. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5499>
- Ali, Z. Z. (2017). PEMIKIRAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI (1891- 1937) DI ITALIA. *Jurnal Yaqzhan*, 3(2), 63–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Andi Nursida, Fatmawati, Lukman Ismail, Maemunah, & Sam'un Mukramin. (2025). TRANSFORMASI KEKERABATAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS INTERAKSI SIMBOLIK DALAM KOMUNIKASI KELUARGA. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 123–135. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2088>
- Arasta, G. M., & Sigit, R. R. (2022). Hegemoni Kekuasaan Dalam Pemilihan Wacana Berita UU ITE Pada Website Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidia.v1i1.465>
- Ardhianto, I. (2020). MEREIMAJINASI METODOLOGI DAN MENGATASI SAINS FIKSI: PENDEKATAN- PENDEKATAN DALAM ANTROPOLOGI TERHADAP FENOMENA MEDIASI DIGITAL. *Human Narratives*, 1(2), 66–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/hn.v1i2.324>
- Arsantika Febrianti.N, & Gigit Mujiyanto. (2023). Kolokial Bentuk Representasi Keakraban dalam Pemakaian Bahasa Militer dengan Model Kekuasaan sebagai Fungsi Interaksional. *METALINGUA Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(2), 108–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/metalingua.v8i2.20970>
- Bagus Riadi, & Diki Drajat. (2019). Analisis Framing Gerakan Sosial : Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Journal For Islamic Social Sciences*, 3(1), 10–18. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik>
- Baharudin, & H. Ibnu Hizam. (2022). PERAN KEKUASAAN DALAM PENDIDIKAN. *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosia*, 13(1), 48–54.
- Budi Mulianto, & Rijalul Fikri. (2018). STRUKTUR LEGITIMASI DALAM MASYARAKAT INDONESIA (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Wedana*, IV(1), 490–497.
- Choudhary, A. (2024). Cosmopolitanism, war and realism: examining the role of dominance. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2432517. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432517>
- Dasih, I. G. A. R. P. (2021). Komunikasi Antarbudaya Dalam Interaksi Beragama Di Pura Bukit Karangasem. *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(1),

- 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/jpah.v5i1.1241>
- Debbaut, S., & De Kimpe, S. (2023). Police legitimacy and culture revisited through the lens of self-legitimacy. *Policing and Society*, 33(6), 690–702. <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2183955>
- Dirhma, R. R. (2025). MAKNA SIMBOLIS DAN FUNGSI SOSIAL DALAM BUDAYA MA'BALIK GANDANG DI KALANGAN KELUARGA BANGSAWAN WALENRANG. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO.
- Dwizatmoko. (2010). KUASA SIMBOLIK MENURUT PIERRE BOURDIEU: TELAAH FILOSOFIS. UNIVERSITAS INDONESIA.
- Eka Pratiwi, Hafiful Hadi Sunliensyar, & Ari Mukti Wardoyo Adi. (2024). Legitimasi kekuasaan Adityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber- sumber prasasti. *Berkala Arkeologi*, 44(2), 121–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/jba.2024.6852>
- Erman Anom, Hamdani M. Syam, Nur Anisah, D. S. (2023). *Politics and Media Hegemony Policy in Indonesia*. 8(1), 85–100.
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. *Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 41–49.
- Fakhrani, F. A. (2024). Ruang-Ruang Pembentuk Aktivisme: Membangun Narasi Politik Mahasiswa Pada Aksi 212. *Lembaran Antropologi*, 3(1), 70–86. <https://doi.org/10.22146/la.4335>
- Fansuri, H. (2017). Konsumerisme dan Hegemoni Barat terhadap Masyarakat Negara Berkembang: Perspektif Antonio Gramsci Hamzah. *Journal Of Integrative International Relations*, 3(2), 33–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4891745>
- Fatmawati, N. (2020). PIERRE BOURDIEU DAN KONSEP DASAR KEKERASAN SIMBOLIK. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1899>
- Gusti Riyanto, Nuni Idrianti, Anggina Dwi Kusumarani, M. Ridwan Said Ahmad, & Ibrahim Arifin. (2024). Politik Simbolisme Agama dalam Kampanye Pemilu. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 26–31.
- Hadi, K. (2018). Legitimasi Kekuasaan Dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'Anyan. *Jurnal Kawistara*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.22146/kawistara.28082>
- Irfan Sobari, & Meli Fauziah. (2025). Implikasi Status Sosial Dalam Gaya Berbahasa Pejabat Publik Di Media Massa. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 199–208. <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jp%0AVol>
- Jayadi, K., Suyudi, M., & Akbar, A. S. (2025). Pengaruh Status Sosial terhadap Kepemilikan Simbol-Simbol Ketorajaan di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Social and Educational Studies*, 6(2), 120–133.
- Judit Kende, Julia Reiter, E. G. T. G. (2022). The role of minority discrimination and political participation in shaping majority perceptions of discrimination: Two cross-national studies. *Sage Journals*, 26(3).

- <https://doi.org/https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://doi.org/10.1177/13684302221075711>
- Karisna, N. N. (2020). Hegemoni Pemangku Kebijakan Bupati Jember Terhadap Media Massa Lokal. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 67-87. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.622>
- Karman. (2017). Bahasa Dan Kekuasaan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 235-246.
- Kellogg, K., Valentine, M., & Christin, A. (2019). Algorithms at Work: The New Contested Terrain of Control. *Academy of Management Annals*, 14(1). <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174>
- Krisna Angela, & Anik Setyawati. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199-216. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Kumaat, J. (2024). BUDAYA PENGGUNAAN SIMBOL-SIMBOL PRESIDEN JOKOWI: STUDI MELALUI TELEVISI YOUTUBE. *Journal Syntax Idea*, 6(10), 6387-6394.
- Leksono, R., Kombaitan, B., Purboyo, H., Winarso, H., & Sutriadi, R. (2019). PEMBANGUNAN KONSENSUS: SOLUSI PERENCANAAN DI BAWAH TEKANAN? *TATALOKA*, 21(3). <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.497-520>
- M. Yusuf, & Gina Nabilah Effendi. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 11-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>
- Mastiyah, S. (2024). Pendekatan antropologis dalam studi islam. *Jurnal Prodi PGMI Al- Misbah*, 10(2), 443-460.
- Mega Mustikasari, Arlin, & Syamsu A Kamaruddin. (2023). Kekuasaan simbolik dalam kerangka Bourdieu. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(1), 9-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Muhammad Fiqri Fadilah, & Saiman. (2007). Elite Political Behavior to Get Positions Through Site Visits in Malang Regency. *Jurnal Sosiologi Agama. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 18(2 issues per year).
- Muttaqin, I., Hasna, A. N., Putra, J. E., & Rosa, A. (2025). PEMBUNGKAMAN MEDIA SOSIAL OLEH REZIM PEMERINTAH: DALAM PERSPEKTIF HADITS. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(6), 1-7.
- Naguib, R. (2020). Legitimacy and "Transitional Continuity" in a Monarchical Regime: Case of Morocco. *International Journal of Public Administration*, 43(5), 404-424. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672733>
- Najwah Addina, & Muh. Hanif. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurna Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(4), 196-210. <https://jipipi.org/index.php/jipipi>
- Nasiwan, & Yuyun Sri Wahyuni. (2016). *Seri Teori-Teori Sosial* (Y. S. W. Nasiwan

- (ed.); pertama). UNY Press.
- Nasyirudin, M. (2025). Nasab dan Kekuasaan Simbolik (Analisis Sosiologis Atas Polemik Rekontekstualisasi Nasab Ba'Alwi di Indonesia). *Translitera*, 14(1), 66–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v14i1.4495>
- Netelenbos, B. (2020). Bringing back Max Weber into Network Governance Research. *Critical Policy Studies*, 14(1), 67–85. <https://doi.org/10.1080/19460171.2018.1523738>
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. *Poetika*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/poetika.v3i2.10437>
- Novarisa, G. (2019). DOMINASI PATRIARKI BERBENTUK KEKERASAN SIMBOLIK TERHADAP PEREMPUAN PADA SINETRON. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(2), 195–211. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Prioharyono, J. E. M. (2012). Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores. *Antropologi Indonesia*, 33(3), 179–202. <https://doi.org/10.7454/ai.v33i3.2463>
- Putra, I. (2023). KARAKTER HALUAN NEGARA DARI MASA KE MASA DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCAREFORMASI. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7, 112. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.316>
- Rahmat Robuwan, J. A. (2023). Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Rahmat. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 48–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.30>
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. (2024). Membangun Silogisme Pendekatan Naratif dalam Proses Pembuatan dan Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 12–32. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Robin, P., Ronda, A. M., & Napitupulu, F. (2024). Hegemony of Independent Campus Learning (Antonio Gramsci's Hegemony Study in the Indonesia Education System). *Academy of Education Journal*, 15(1), 1072–1081. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2341>
- Sakir, I. M. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN MIXED METHOD (Lisdiana (ed.); 1st ed.). FILOSOFIS INDONESIA PRESS.
- Sasanti Silvy Putri, Mutia Hesti Istiqomah, Nayla Amara Kuncoro, & Dwi Susanto. (2025). HEGEMONI KEKUASAAN DALAM NOVEL ANIMAL FARM KARYA GEORGE ORWELL (TEORI GRAMSCI). *PENEROKA : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 223–233. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v5i2.4149>
- Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022). Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antropologi Politik). *UMBARA Indonesian Journal of Anthropology*, 7(1), 50–60. <https://doi.org/10.24198/umbara.v7i1.39131>
- Siti Asma Slamet, & Afdhal. (2024). Negosiasi Kekuasaan dalam Komunitas Adat : Komunikasi Politik dan Pemilihan Kepemimpinan di Negeri Hitumessing.

- Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 31–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30598/populis.19.1.31-45>
- Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern : Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(5), 243–251.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>
- Syahdidatul Faizah Maulidiastuti, & Anas Ahmadi. (2025). Representasi Hegemoni Gramsci dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar Karya Tere Liye. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 5(1), 50–64.
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/index>
- Syahwal. (2024). Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum : Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja. *Undang: Jurnal Hukum*, 7(1), 1–41.
<https://doi.org/10.22437/ujh.7.1.1-41>
- Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori Dan Praktik Model Demokrasi Konsensus Di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 450–473.
<https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.174>
- Szelenyi, I. (2016). Weber's theory of domination and post-communist capitalisms. *Theory and Society*, 45(1), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s11186-015-9263-6>
- Wiranta, M. A. (2020). *PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU*. UNIVERSITAS UDAYANA.
- Yao, F. K., Yang, J. Y., Chang, S., & Lu, J. W. (2025). Not all threats are equal: symbolic and realistic threats and the deployment of parent-country nationals. *Journal of International Business Studies*, 56(2), 174–193.
<https://doi.org/10.1057/s41267-023-00654-7>
- Yudha Catur Pamungkas, Agoes Moh. Moefad, & Ryan Purnomo. (2024). Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi. *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28–36. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>
- Zahra, A., Asshiddiqi, F., Rustu, A., Purba, B., & Herdiansyah, A. (2024). Legitimasi Politik Informal Dukun Tengger di Desa Ngadas. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(2), 576–585.
<https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.576-585>
- Zhang, J., Xu, D., & Chen, L. (2024). Enhancing supportive intention through perceived legitimacy: Social media influencer leadership and charismatic legitimization in CSR communication. *Public Relations Review*, 50(5), 102511.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2024.102511>